

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses transformasi jangka panjang untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran manusia (BPS, 2014). Pembangunan ekonomi membutuhkan suatu modal. Selama ini keberhasilan pembangunan ditentukan oleh tiga faktor modal, yaitu modal manusia, modal fisik dan modal alam. Namun, pada tahun 2011 modal sosial ditempatkan sebagai salah satu indikator input untuk mencapai tujuan pembangunan oleh *Organization of Economic Cooperation and Development*.

Modal sosial merupakan suatu nilai dan norma yang dipatuhi oleh masyarakat bertujuan untuk memperkuat jaringan sosial, sehingga masyarakat dapat mencapai tujuan bersama (Widjajanti, 2011). Modal sosial adalah suatu ciri-ciri dalam organisasi sosial, berupa norma-norma yang dipatuhi dalam suatu kelompok, kepercayaan sesama anggotanya serta jaringan sosial yang mendorong perilaku kerjasama demi kebermanfaatan bersama (Putnam, 1993).

Berdasarkan hasil penelitiannya, Putnam (1993) menyimpulkan komponen modal sosial yaitu kepercayaan, norma, dan jaringan. Kepercayaan memiliki pengaruh yang baik untuk kehidupan masyarakat. Sebagai contoh masyarakat dalam membantu sesamanya didasari oleh rasa percaya sehingga ia akan mengacu pada norma-norma yang berlaku untuk membantu individu yang membutuhkan bantuannya. Komponen kedua yaitu norma merupakan sebuah aturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditaati oleh masyarakat. Komponen ketiga yaitu jaringan sosial merupakan komponen modal sosial yang

memudahkan komunikasi, koordinasi, dan kerjasama anggota masyarakat sehingga mampu menumbuhkan kepercayaan pada setiap anggotanya. Sedangkan partisipasi menurut Widodo (2015) adalah kesadaran masyarakat dalam kewajibannya untuk berkontribusi semampunya demi kesejahteraan kelompok.

Modal sosial penting dimiliki oleh masyarakat karena dapat berdampak pada efektivitas pemerintahan. Dampak positif modal sosial yaitu pemerintahan yang berlandaskan kepercayaan dari masyarakat memiliki akuntabilitas yang lebih kuat (Widodo, 2015). Selain itu, modal sosial juga berpengaruh terhadap rumah tangga dari sisi kesejahterannya. Modal sosial yang tinggi dapat berdampak pada meningkatnya kesejahteraan rumah tangga (Grootaert, 2001).

Sedangkan modal sosial yang rendah dapat menurunkan tingkat partisipasi masyarakat sehingga mengakibatkan kemunduran ekonomi (Soekanto, 2007). Contohnya di Pulau Papua yang mempunyai tingkat modal sosial rendah menyebabkan kesulitan pemerintah dalam melaksanakan aturan untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakatnya. Penyebab rendahnya modal sosial di Pulau Papua yaitu instansi pemerintah kurang efisien dalam mengelola dana alokasi khusus bahkan ada yang korupsi sehingga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menurun (Soekanto, 2007). Tidak hanya di Pulau Papua, kondisi modal sosial di Indonesia semakin menurun, hal tersebut ditandai dengan menurunnya kepercayaan masyarakat kepada aparatur pemerintah. Masyarakat menjadi kurang percaya kepada pemerintah karena banyaknya oknum pemerintah yang melakukan tindak korupsi.

Menurut Soekanto (2007) masyarakat di pedesaan mayoritas bergantung pada sektor pertanian yang mempunyai skala usaha kecil. Hal itu menghambat petani untuk meningkatkan pendapatan. Selain itu, luas lahan yang sempit, infrastruktur yang terbatas, serta teknologi, informasi, dan aksesibilitas modal yang rendah dapat menurunkan tingkat produktivitas petani. Jadi, untuk mendukung keberhasilan petani dalam upaya mengurangi kemiskinan dibutuhkan kelembagaan petani yang efektif dan efisien..

Kelembagaan dalam sektor pertanian dapat ditemui dalam organisasi kelompok tani. Melalui organisasi tersebut petani mendapatkan aksesibilitas pada informasi pertanian, aksesibilitas pada modal, aksesibilitas pada pasar, inovasi dan teknologi dalam pertanian, dan berbagai kemudahan lainnya. Widodo (2015) menyatakan bahwa pemerintah dan swasta lebih mudah dalam memfasilitasi petani saat petani tersebut mempunyai kelembagaan sendiri. Pengembangan kelembagaan pertanian berfungsi untuk meningkatkan produktivitas, daya saing petani, dan efisiensi usaha tani. Contohnya saat kelompok tani membeli teknologi pertanian (mesin bajak) dari uang kas artinya anggota kelompok tani dapat menggunakan mesin itu tanpa harus membeli. Petani itu dapat mengalokasikan uangnya untuk kebutuhan lain seperti membeli bibit, membeli pupuk, dan lain-lain.

Modal sosial pada sektor pertanian dicirikan pada kuantitas dan kualitas organisasi kelompok tani, karena kelompok tani merupakan organisasi yang mewadahi petani dalam memudahkan mereka menyalurkan aspirasi, memudahkan sarana produksi, dan pemasaran hasil tani. Perdagangan hasil pertanian membutuhkan jaringan sosial. Jejaring antar pelaku pertanian dengan swasta dan pemerintah akan lebih mudah didapatkan saat kelompok tani

mempunyai modal sosial. Permasalahan yang dihadapi petani seperti kegiatan perdagangan yang merugikan produsen dapat dihindari dengan memacu posisi tawar petani melalui modal sosial (Widodo, 2015).

Penelitian-penelitian yang membuktikan korelasi positif antara modal sosial dan produktivitas petani diantaranya: penelitian Widodo (2015) dimana komponen modal sosial seperti kepercayaan, norma, jaringan, informasi, dan partisipasi mempunyai korelasi positif dengan produktivitas jagung di Kecamatan Palokulon Kabupaten Grobogan meskipun tidak signifikan. Sedangkan penelitian yang berjudul "Strategi Peningkatan Produktivitas Petani Melalui Penguatan Modal Sosial" menyimpulkan bahwa modal sosial merupakan solusi tepat untuk mengatasi masalah petani khususnya pada sektor tanaman pangan (Ulinuha, 2012). Penelitian lain tentang "Pengaruh Modal Sosial terhadap Produktivitas Petani, Studi Kasus Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap" menghasilkan kesimpulan pengaruh positif antara variabel kepercayaan, jaringan, partisipasi, dan norma dengan produktivitas petani (Kholifa, 2016). Selanjutnya hasil penelitian Cahyono (2014) menunjukkan modal sosial dapat meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi dan *community development* pada petani tembakau di Kabupaten Wonosobo. Namun hasil penelitian Winarni (2011) yaitu "Keterkaitan antara Modal Sosial dengan Produktivitas pada Sentra Bawang Merah di Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung" menghasilkan kesimpulan yang tidak sama dengan penelitian lainnya, dimana modal sosial kurang mempengaruhi produktivitas. Lemahnya modal sosial yang dimiliki petani di kedua desa mempunyai tipe yang berbeda. Di Desa Lamajang produktivitas petani cukup rendah, variabel kepercayaan tinggi namun tidak seiring dengan perkembangan

variabel jaringan kerja. Di Desa Margamulya para petani mempunyai produktivitas yang tinggi meskipun tingkat kepercayaan dan tingkat norma yang ditaati petani cukup rendah, namun variabel jaringan mempunyai nilai yang cukup tinggi sehingga mampu membawa dampak peningkatan produktivitas petani (Winarni, 2011).

Sektor pertanian menjadi sektor penyumbang PDRB terbesar di Kabupaten Nganjuk. Sementara itu kondisi modal sosial di sektor pertanian cukup baik, karena terdapat 962 kelompok tani di Kabupaten Nganjuk, kelompok petani kecil berjumlah 632 kelompok, Kelompok Usaha Agribisnis (KUA) ada 42 kelompok, dan jumlah penyuluh pertanian ada 93 orang (Pertanian, 2017). Hal tersebut membuktikan bahwa di Kabupaten Nganjuk memiliki kelembagaan yang menjadi wadah masyarakat petani dalam memajukan pertaniannya.

Karakteristik masyarakat Kabupaten Nganjuk yaitu masyarakatnya homogen yang didiami oleh suku Jawa dan mayoritas beragama Islam. Masyarakat di Kabupaten Nganjuk masih mempertahankan budaya gotong royong dalam berbagai aktivitas. Masyarakat di Kabupaten Nganjuk patuh terhadap norma adat. Hal tersebut dapat dilihat ketika melakukan aktivitas keagamaan dan tradisi adat pada saat kejadian-kejadian tertentu seperti kelahiran, kematian, perkawinan, bersih desa atau nyadran, dan tradisi-tradisi lainnya. Dengan demikian keberadaan modal sosial dalam masyarakat di Kabupaten Nganjuk diharapkan dapat menumbuhkan partisipasi untuk meningkatkan pengembangan masyarakat tidak hanya terbatas pada tradisi adat dan aktivitas keagamaan, tetapi modal sosial juga dapat ditemui di sektor pertanian untuk meningkatkan produktivitas petani.

Tabel 1.1 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Nganjuk (juta rupiah) tahun 2011-2016

No.	Sektor	2014	2015	2016
1.	Pertanian	4.538.475	4.694.528	4.850.648
2.	Pertambangan	283.291	296.067	309.266
3.	Industri Pengolahan	1.836.090	1.941.065	1.650.886
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	7.746	7.852	8.135
5.	Pengadaan Air, Sampah, Limbah dan Daur Ulang	15.974	16.855	17.762
6.	Konstruksi	1.308.906	1.352.035	1.443.102
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.655.859	2.850.802	3.032.854
8.	Transportasi dan Pergudangan	198.628	212.979	228.492
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	250.492	271.071	293.910
10.	Informasi dan Komunikasi	700.088	748.005	805.282
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	331.106	353.358	379.195
12.	Real Estate	248.269	261.519	276.784
13.	Jasa Perusahaan Administrasi	47.635	50.383	53.197
14.	Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	696.116	737.673	773.855
15.	Jasa Pendidikan	504.289	537.022	570.005
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	87.278	88.947	94.157
17.	Jasa Lainnya	432.638	455.188	476.658
	Total PDRB	14.142.880	14.875.351	15.264.188

Sumber : Kabupaten Nganjuk dalam Angka, 2017

Tabel 1.2 Kontribusi Kabupaten Nganjuk terhadap Produksi Bawang Merah

Provinsi dan Nasional 2013-2016

Uraian	Produksi (Ton)			
	2013	2014	2015	2016
Kabupaten Nganjuk	119.660	140.229	142.817	135.648
Jawa Timur	243.087	293.179	277.121	277.121
Indonesia	1.010.773	1.233.984	1.229.184	1.295.453
Kontribusi Kabupaten Nganjuk terhadap:				
Jawa Timur (%)	49,23	47,83	51,54	48,95
Produksi Nasional (%)	11,84	11,36	11,62	10,47

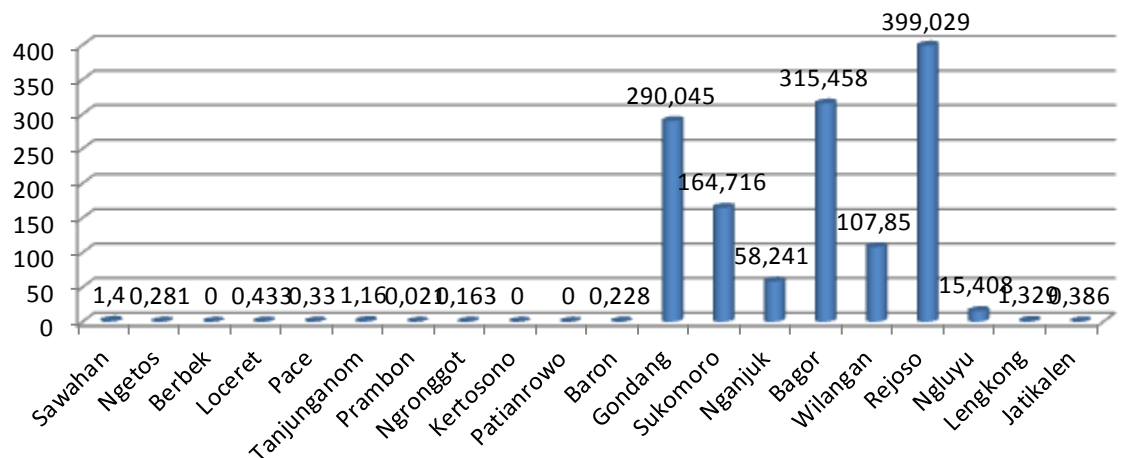
Sumber: BPS dan Ditjen Hortikultura, 2016

Daerah sentra produksi bawang merah utama di Indonesia adalah di Provinsi Jawa Tengah yang memasok 40 persen kebutuhan bawang merah nasional (Pertanian, 2014). Daerah sentra produksi bawang merah yang kedua adalah Provinsi Jawa Timur yang memasok 20 persen kebutuhan bawang merah

nasional. Sedangkan di Provinsi Jawa Timur sendiri, Kabupaten Nganjuk menjadi pemasok bawang merah terbesar di provinsi ini meskipun setiap tahunnya mengalami penurunan produksi. Penurunan produksi ini merupakan suatu masalah yang harus segera diselesaikan agar petani di wilayah Kabupaten Nganjuk dapat mempertahankan keberlanjutan produksinya. Masalah penurunan produksi dapat diselesaikan tidak hanya menggunakan modal fisik, modal alam, dan modal manusia, tetapi juga dengan modal sosial.

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa dari dua puluh kecamatan yang di Kabupaten Nganjuk, Kecamatan Rejoso menjadi kecamatan dengan produksi bawang merah tertinggi. Dari dua puluh empat desa di Kecamatan Rejoso terdapat lima belas desa penghasil bawang merah (Dinas Pertanian, 2017). Dengan luas lahan 3.589,71 hektar mampu memproduksi 46.368,74 ton bawang merah. Produktivitas lahannya yaitu satu hektar lahan dapat menghasilkan 12,92 ton. Artinya dalam 1 hektar lahan mampu menghasilkan 12,92 ton bawang merah.

Kelembagaan yang ada dalam petani bawang merah di Kecamatan Rejoso tercermin dari jumlah dan kondisi kelompok tani. Kelompok tani di Kecamatan Rejoso cukup tinggi jumlahnya. Selain itu kondisi kelembagaannya juga baik artinya kelembagaan yang ada mampu memberikan manfaat bagi petani baik pada saat proses produksi maupun saat memasarkan hasil produksinya. Hal itu dapat mendukung produktivitas petani menjadi lebih baik. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengetahui seberapa besar pengaruh modal sosial (kepercayaan, norma, jaringan, dan partisipasi) terhadap produktivitas petani bawang merah di Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk.



Sumber : Nganjuk dalam Angka, 2017

Gambar 1.1 Produksi Bawang Merah (1000 ton) per Kecamatan di Kabupaten Nganjuk Tahun 2016

Dari tabel 1.2 dapat diketahui produktivitas pertanian bawang merah (ton per hektar) lima belas desa di Kecamatan Rejoso. Rata-rata petani dapat menghasilkan 12,15 ton bawang merah dalam satu hektar lahan. Dalam satu desa ada yang mempunyai satu sampai tujuh kelompok tani. Beberapa kelompok tani tersebut kemudian bergabung menjadi Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Setiap desa mempunyai satu Gapoktan yang bertugas untuk membantu petani dalam usaha pertanian yang mereka lakukan. Upaya meningkatkan produktivitas petani bawang merah tidak terlepas dari pengaruh kelompok tani dalam mengedukasi petani melalui sosialisasi, pelatihan, promosi obat dan pupuk, dan pemberitahuan cara bertani yang terbaru untuk kemajuan petani dalam meningkatkan produktivitasnya.

Tabel 1.3 Desa, Produktivitas, Jumlah Kelompok Tani, dan Anggota Kelompok Tani

No.	Desa	Produktivitas (Ton/Ha)	Jumlah Kelompok Tani (Kelompok)	Anggota Kelompok Tani (Orang)
1.	Sidokare	14	3	560
2.	Sukorejo	14	3	350
3.	Mungkung	14	4	470
4.	Gempol	14	3	227
5.	Puhkerep	10,2	5	815
6.	Mlorah	9,5	5	750
7.	Jatirejo	12	4	305
8.	Klagen	13	2	503
9.	Setren	10,5	3	127
10.	Mojorembun	14	4	630
11.	Ngadiboyo	14	7	720
12.	Rejoso	15	3	300
13.	Ngangkatan	10	2	198
14.	Jintel	8	1	78
15.	Wengkal	10	1	87
	Total	-	50	6293

Sumber : Dinas Pertanian, 2017

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana pengaruh modal sosial (kepercayaan, norma, jaringan, dan partisipasi) terhadap produktivitas petani bawang merah di Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengetahui pengaruh modal sosial (kepercayaan, norma, jaringan, dan partisipasi) terhadap produktivitas petani bawang merah di Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat praktis :

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan produktivitas petani bawang merah.

Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat, khususnya petani untuk meningkatkan produktivitas lahannya.

2. Manfaat teoritis :

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian yang berkaitan dengan modal sosial dan produktivitas petani.